

*Syahpawi*

---

**PRILAKU MUAMALAH BUDAYA MELAYU DAPAT  
DIJADIKAN SEBAGAI DASAR PRODUK  
PERBANKAN ISLAM**

***Abstract:***

**A. PENDAHULUAN**

Pembahasan ini membicarakan tentang beberapa prilaku muamalah budaya melayu yang dapat dijadikan sebagai dasar-dasar produk perbankan Islam, selain daripada produk-produk perbankan yang telah ada. Budaya melayu sebagai prilaku muamalah yang telah dilakukan dan berlaku dari sejak dulunya dapat ditawarkan kembali kepada institusi-institusi keuangan dan perbankan yang akan diciptakan dari prilaku budaya melayu tersebut. Budaya diartikan sebagai cara berfikir, berkelakuan dan lain-lain.<sup>1</sup> Pembuatan muamalah yang dilakukan oleh masyarakat melayu dapat dipertimbangkan kembali untuk dijadikan sebagai produk perbankan Islam yang maju dan terkini sehingga prilaku muamalah budaya melayu tersebut dapat dijadikan sebagai penentu dan pesaing dalam era globalisasi ekonomi modern. Budaya-budaya yang telah dikenal dari dulunya perlu digali kembali sebagai khazanah budaya bangsa untuk dikemukakan dan dikembangkan dalam suatu bentuk aliran fiqh muamalah yang modern. Hal ini dapat dilakukan berdasarkan kepada pemikiran (ijtihad) yang sesuai dengan suasana dan keadaan serta tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

## **B. PRILAKU MUAMALAH BUDAYA MELAYU**

Budaya melayu yang berkaitan dengan perbuatan muamalah tersebut dapat dilihat dari beberapa prilaku muamalah yang telah terjadi dari dulunya hingga masa kini. Perbuatan tersebut masih wujud dalam kehidupan masyarakat budaya melayu yang dapat dilihat dalam beberapa aktivitas ekonomi yang akan dikemukakan dalam pembahasan ini. Prilaku muamalah dalam kebudayaan melayu dapat dijadikan sebagai produk-produk perbankan Islam oleh institusi-institusi perbankan dan keuangan yang telah ada. Ada beberapa perilaku budaya melayu dapat dijadikan sebagai produk perbankan Islam, diantaranya adalah:

### **a. Permainan Jejula (Arisan)**

*Jejula* atau permainan jejula dikenal oleh masyarakat melayu di kawasan Riau, terutama di Riau kepulauan. Sedangkan di Riau daratan istilah ini lebih dikenal dengan sebutan *Julojulo*, perkembangan berikutnya pada kalangan masyarakat melayu modern istilah ini lebih dikenal dengan sebutan *Arisan*.<sup>2</sup> Di Malaysia permainan ini dikenal dengan istilah permainan *Kutu*.<sup>3</sup> Jejula apapun istilahnya yang seumpama dengan hal tersebut didefinisikan sebagai perkumpulan yang mengumpulkan uang pada waktu tertentu (minggu, bulan dan tahun) dan menentukan giliran untuk mendapatkan penerimaan uang dengan cara mengundi.<sup>4</sup> Meskipun tidak ada kenyataan yang jelas tentang jenis akad yang dilaksanakan, tetapi dapat dikatakan bahwa pada pelaksanaannya akad *wadi'ah* (titipan) sudah terwujud yang digunakan oleh anggota yang ikut serta dengan kegiatan tersebut yaitu pada waktu menyerahkan uang jejula kepada ketua kumpulan yang dilantik.

Prilaku permainan jejula ini telah menjadi budaya dikalangan masyarakat, ini bertujuan untuk melakukan kegiatan tolong-menolong dan kerjasama diantara sesama anggota masyarakat dalam mengatasi masalah keuangan dan untuk mendapatkan modal dalam jumlah tertentu tanpa perlu pergi ketempat instansi keuangan dan perbankan. Jumlah dana yang terkumpul dalam satu pusingan tersebut tergantung

kepada persetujuan masing-masing anggota dan latarbelakang pekerjaan dan keuangan mereka. Uang yang mereka peroleh dari permainan jejula tersebut kebanyakannya digunakan untuk mengembangkan usaha. Dalam sudut pandang yang lain prilaku seperti ini adalah untuk mengelakkan orang-orang Islam dari praktek riba yang dilakukan oleh perbankan konvensional dengan menggunakan bunga untuk mendapatkan pinjaman modal.

Daripada itu pelaksanaan permainan jejula ini juga, jika dikembangkan kedalam produk perbankan dalam bentuk *pembiayaan modal* dengan menggunakan Formula yang baru dan merubah sistem dalam bentuk pelaksanaannya untuk menolong masyarakat miskin sangat mungkin dilakukan. Pembiayaan modal yang bisa dilakukan adalah dalam bentuk *Qard Hasan*<sup>5</sup> (Pinjaman Kebajikan) dengan memadukan prilaku muamalah budaya melayu yang telah terjadi (jejula), sehingga *Qard Hasan* pada mulanya adalah pembiayaan dalam bentuk *Kunsumtif* berubah menjadi pembiayaan dalam bentuk produktif yang sangat dibutuhkan pada saat ini.

Dalam sistem pembiayaan produktif dalam bentuk *Qard Hasan* ini dengan memadukan jejula sebagai prilaku muamalah budaya melayu sangat tepat digunakan untuk membantu masyarakat miskin didaerah perkampungan dan perdesaan bagi daerah-daerah tertinggal yang sangat memerlukan modal dalam pengembangan usaha mereka. Perpaduan diantara kedua bentuk tersebut dengan merubah pada sistem pelaksanaannya, dimana anggota masyarakat yang terlibat di dalamnya dijadikan dalam satu bentuk modal usaha, sehingga seluruh jumlah bagian masing-masing modal yang diperlukan dapat dikeluarkan sekaligus secara keseluruhannya sebanyak jumlah anggota masyarakat dan masa yang digunakan dalam tempo yang ditentukan (1 tahun) untuk dijadikan satu modal usaha bersama. Hal ini tidak terlepas dari keikutsertaan pemerintah (lurah, camat dan sebagainya) dalam kegiatan ini sebagai penjamin (*kafalah bin-nafs*) terhadap pengembalian modal yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan.

Sebagai contoh anggota jejula/arisan 50 orang, masing-masing anggota membayar Rp 15.000 / minggu, maka satu bulan masing-masing anggota membayar Rp 15.000 x 4 = Rp 60.000. Jumlah anggota arisan 50 orang maka dalam satu bulan sudah menghasilkan Rp 60.000 x 50 = Rp 3.000.000, Disebabkan pembiayaan *Qard Hasan* adalah pembiayaan dalam jangka pendek tidak melebihi dari satu tahun maka Rp 3.000.000 x 12 bulan = Rp 36.000.000, inilah yang harus dikeluarkan oleh lembaga keuangan sekaligus yang dapat dijadikan sebagai modal usaha bukan untuk konsumtif tetapi untuk produktif. Anggota hanya membayar/menyetor seperti biasa kepada bank sebagai titipan sesuai dengan kontrak jejula/arisan (*Wadi'ah*). Sedangkan pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada persatuan jejula/arisan sekaligus inilah yang disebut dengan *Qard Hasan*.

Jika perpaduan ini dilakukan maka pelaksanaan *Qard Hasan* bukan lagi dalam bentuk pembiayaan konsumtif tetapi berubah menjadi pembiayaan produktif, ini tidak terlepas dari semangat dan keinginan masing-masing anggota dalam mengembangkan usaha demi untuk memajukan usaha dan meningkatkan tarap perekonomian masyarakat dalam mengembangkan nilai-nilai keusahawan. Semangat dari masing-masing anggota dalam mengembangkan usaha tersebut lebih dikenal dengan istilah semangat keusahawan yang tinggi dari masing-masing anggota.

Apabila prilaku muamalah budaya melayu dengan mengabungkan konsep-konsep syariah dapat dijalankan secara baik dan sempurna oleh lembaga keuangan dan para pihak yang terkait, maka ini akan dapat mengangkat masyarakat miskin untuk merubah strata perekonomian menjadi masyarakat yang maju dan berhasil dalam pembangunan ekonomi kedepan.

#### **b. Pajak /Gadai Kebun<sup>6</sup> (*Ar-Rahn*)**

Gadai adalah apabila sesuatu barang yang berharga yang menjadi jaminan atau sandaran utang dan barang itu boleh dijualbelikan untuk menebus jumlah utang yang tidak dapat diselesaikan dan sisanya dikembalikan kepada pemilik asal barang.<sup>7</sup>

Pajak/ Gadai Kebun (*Ar-Rahn*) ini dilakukan oleh masyarakat Riau kepulauan dan Riau daratan, biasanya dilakukan pada perkebunan getah, sagu, kelapa, sawah dan sebagainya. Kegiatan ini dilakukan dalam keadaan terpaksa. Ini merupakan jalan yang mudah dan mengelakkan dari pada riba untuk memperoleh uang (modal) bagi keperluan yang mendesak untuk pendidikan anak-anak mereka. Bentuk pelaksanaannya dimana masyarakat yang membutuhkan uang dengan cepat, mereka mendatangi tauke, kebun tersebut untuk dipajak/ gadai dalam masa tertentu (2, 5, 10 tahun) sesuai dengan kesepakatan, biasanya kebun yang digadai tersebut sudah mendatangkan hasil, dalam masa tempo tersebut tauke yang memberi pinjaman uang (modal) berhak untuk menggunakan dan memperoleh hasil atas kebun yang telah digadai/dipajak. Jika masa tersebut berakhir maka kebun tersebut akan kembali kepada tuan yang punya kebun.

Sebagai contoh Si A mempunyai sebidang kebun sagu yang sudah menghasilkan, menurut kebiasaannya kebun tersebut sudah bisa ditebang kembali dalam masa tiga tahun lagi diperkirakan dapat menghasilkan 100 batang dengan jumlah Rp 10.000.000, namun Si A pada saat ini sangat memerlukan uang untuk keperluan sekolah anaknya, maka Si A pergi menjumpai tauke sagu untuk mengadaikan / pajak kebun. Maka tauke sagu menyetujuinya setelah melihat kondisi kebun tersebut dengan memberikan pinjaman kepada Si A sebanyak yang dia inginkan dalam masa tempo (3, 5, 10 tahun) sesuai dengan kesepakatan. Selama masa tempo yang di gadai/pajak kebun tersebut, tauke yang memberikan pinjaman kepada Si A mengambil hasil dari kebunnya, kemudian apabila masa tempo berakhir maka diantara para pihak menghitung kembali berapa jumlah yang dihasilkan dari kebun yang berada ditangan tauke selama tempo tersebut dan berapa kekurangannya atas pinjaman yang diberikan. Jika terjadi kekurangan dari jumlah pinjaman maka dianggap sebagai utang dan sebaliknya jika ada kelebihan maka akan dibayar oleh tauke kepada Si A.

Dalam Islam pelaksanaan seperti ini dikenal dengan istilah *Ar-Rahn*.<sup>8</sup> *Ar-Rahn* adalah menahan salah satu milik si peminjam sebagai

jaminan atas pinjaman yang diterima. Barang yang diterima tersebut haruslah bernilai ekonomis. Ini dapat dikatakan bahwa pihak yang menahan dapat memperoleh jaminan atas modal yang diberikan kepada peminjam. Perjanjian gadaian merupakan satu langkah maju bagi menyakinkan para pihak dalam melakukan akad tersebut. Pelaksanaan pergadaian yang dilakukan oleh masyarakat di kampung-kampung dapat diterapkan dalam sistem perbankan dengan merubah bentuk pelaksanaan pergadaian yang telah ada dilakukan selama ini, dimana barang yang digadai tidak digunakan hanya bersifat jaminan. Namun pergadaian yang dilakukan oleh masyarakat yang telah menjadi budaya tersebut, dimana barang yang digadai dapat dimanfaatkan oleh si penerima gadaian. Penekanannya adalah barang yang digadai tersebut haruslah barang yang dapat dimanfaatkan sesuai dengan uang yang diambil sebagai bayaran terhadap barang yang diambil manfaatnya. Pemikiran seperti ini akan membuka peluang bagi masyarakat dalam memerlukan biaya pendidikan anak-anak mereka yang sangat memerlukan pendidikan yang merupakan nafkah dalam bentuk rohani yang wajib dipenuhi oleh masing-masing orang tua dan sangat tepat apabila diterapkan dalam perbankan Islam.

**c. Sistem Perdua<sup>9</sup> (Perdua Haiwan atau Tanah)**

Di dalam kamus perkataan *perdua*<sup>10</sup> diartikan sebagai membagi dua dari hasil yang akan diperoleh dalam usaha tanah perkebunan, binatang ternak yang telah ditentukan diantara pengusaha dengan pemiliknya. Istilah *perdua* ini digunakan pada masyarakat melayu yang berada di daerah Riau kepulauan dan pesisir, namun pada melayu serumpun seperti Malaysia istilah *perdua* lebih kenal dengan sebutan *pawah*.<sup>11</sup> Dimana pelaksanaan sistem *pawah* yang dilaksanakan di Malaysia diberikan pada perkebunan, tanah dan hewan ternak. Hal ini juga berlaku di daerah Melayu Riau. Dalam sistem *pawah* hewan yang telah dikomersialkan oleh jabatan hewan (*Veterinary Department*) diartikan sebagai skim pinjaman hewan betina.<sup>12</sup> *Pawah* dan *perdua* dalam pengertian yang umum dan luas lebih kenal dengan istilah pinjaman (*loan*).<sup>13</sup>

Pelaksanaan sistem ini bertujuan untuk menambah jumlah binatang peliharaan serta untuk memperbaiki strata kehidupan ekonomi masyarakat yang berada pada perdesaan dan perkampungan.<sup>14</sup> Prilaku muamalah budaya melayu ini bertujuan untuk membantu anggota masyarakat yang tidak mempunyai modal dalam mengembangkan usaha mereka baik yang berhubungan dengan binatang ternak maupun perkebunan dan sawah ladang serta untuk meningkatkan tarap ekonomi masyarakat. Pelaksanaan ini dilakukan dimana pada masa yang sama pihak pemodal atau pemilik binatang akan memiliki binatang yang diperdua tersebut setelah masa tempo tertentu, yaitu sampai binatang tersebut melahirkan anak dan dalam umur yang sama.

Akad seperti ini dapat dilihat sama seperti dengan akad *mudharabah* yaitu pemilik binatang asal adalah sebagai pemodal (*Sleeping partner/ Shahib al-mal*) dan penerima perdua adalah pengusaha (*entrepreneur/ Mudharib*) bersepakat untuk melakukan kerjasama dengan kesepakatan dimana baka binatang akan menjadi milik pengusaha apabila anak yang dilahirkan oleh binatang tersebut telah mencapai umur tertentu dan dikembalikan kepada pemilik modal. Secara tidak langsung bagi mereka yang mempunyai daya usaha dan semangat yang tinggi untuk maju dalam bidang ekonomi tetapi tidak mempunyai modal, dapat diberi kesempatan untuk membangun dan mengembangkan Industri Perternakan dan dapat mengurangi ketergantungan kepada negara-negara luar yang sudah dikenal dalam usaha industri tersebut.

Begitu juga halnya dalam bentuk pertanian dan perkebunan sistem perdua dilakukan oleh para petani yang tidak mempunyai tanah. Di mana para petani akan memperdua tanah dengan tuan yang mempunyai tanah baik itu dalam bentuk padi, kelapa, kelapa sawit dan sebagainya dari hasil pertanian yang diperoleh tersebut akan dibagikan kepada pemiliknya sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Misalnya dari seluruh hasil pertanian sebagian dibagikan kepada pemiliknya dan sebagian lagi kepada pengusaha petani. Tempo perdua ini akan berakhir apabila hasil untuk satu musin telah dipungut atau batas

tempo tertentu yang telah dipersetujui itu terpenuhi. Prilaku muamalah budaya melayu ini dilakukan dengan tujuan untuk menghindari para petani yang tidak mempunyai modal dari prilaku pinjaman kepada bank-bank konvensional yang menggunakan sistem bunga cenderung kepada riba, serta memberatkan bagi petani untuk membayar hutang apabila terjadinya pinjaman.

Bagi para petani yang miskin yang berada dalam keadaan yang tidak baik apabila terjadi pinjaman kepada bank konvensional, mereka terpaksa untuk membayar pinjaman hutang mereka meskipun hasil dari perkebunan dan pertanian mereka tidak menjadi atau memperoleh hasil yang sedikit. Namun berbeda halnya dengan sistem perdua ini, dimana para petani hanya perlu membayar sesuai dengan hasil yang mereka peroleh, baik hasil panennya melimpah maupun sedikit. Dalam persoalan perdua ini, yang perlu dibayar atau dibagikan antara kedua belah pihak adalah kadar ratio daripada hasil pertanian dan perkebunan yang diperoleh, bukan satu jumlah yang tetap.

Prilaku muamalah budaya melayu yang berhubungan dengan pelaksanaan perdua ini, perlu dikembangkan dan ditetengahkan serta diterapkan baik itu melalui instansi pemerintah maupun swasta, apalagi kepada lembaga-lembaga keuangan sangat diharapkan menerapkan sistem ini dalam membantu masyarakat dipedesaan dan diperkampungan.

#### **d. Jual Janji (*Bay al-Wafa'*)**

Jual janji (*conditional sale*) adalah perbuatan muamalah dalam kebudayaan melayu, terutama dikalangan masyarakat yang berada didaerah Riau kepulauan, pesisir dan Riau daratan yang melakukan kegiatan tersebut. Perbuatan ini telah dilakukan semenjak pemerintah kerajaan berdaulah berlangsung dan sebelum zaman penjajahan lagi. Prilaku budaya melayu (jual janji) ini telah terjadi dan ditetengahkan serta menjadi kebiasaan bagi masyarakat pada masa dulunya sampai sekarang prilaku tersebut masih berlaku. Dalam bahasa fiqh jual janji ini lebih dikenal dengan istilah *Bay al-Wafa'*. Dari segi bahasa *Al-Bay'* berarti jual beli dan *al-wafa'* berarti pelunasan atau penyelesaian

hutang. Para ulama fiqh telah mengartikan sebagai salah satu jual beli yang dilakukan oleh dua pihak dengan mensyaratkan bahwa barang yang diadakan tersebut dapat dibeli kembali oleh penjual apabila masa temponya berakhir dengan bersetujuan kedua belah pihak yang berakad.<sup>15</sup> Bentuk ini dilakukan adalah untuk mendapatkan modal dalam usaha pembuatan kebun dan seumpama dengan kebun serta bermacam-macam penanaman perkebunan lainnya tanpa perlu menjumpai institusi yang memeras (Lintah darat/ tangkulak). Hal ini dilakukan untuk menghindari dari perbuatan atau praktek-praktek tangkulak atau lintah darat yang penuh dengan riba dan tipu helah yang terjadi pada masa tersebut.<sup>16</sup>

Pelaksanaan akad ini juga banyak dilakukan oleh penduduk di Asia Tenggara (Bukhara) pada pertengahan abad ke 5 H untuk menghindari daripada perbuatan pinjaman yang melibatkan unsur-unsur riba, dan hal ini juga dilakukan oleh masyarakat timur tengah pada masa kemudiannya.<sup>17</sup> Akad yang menjadi budaya melayu yang merupakan perbuatan muamalah dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan kemudahan kredit tanpa terlibat dengan perbuatan (amalan) riba. Akad ini biasa dilakukan oleh masyarakat melayu dalam bentuk penjualan tanah atau harta tetap milik penjual kepada pembeli dengan janji untuk membeli semula tanah tersebut dalam tempo tertentu (misalnya 2-3 tahun). Dalam masa tempo itu pembeli boleh menggunakan dan menduduki tanah tersebut. Jika masa tempo yang dijanjikan tersebut penjual gagal untuk membeli semula hartanya, maka ia akan berpindah kepada si pembeli dan harta tersebut menjadi milik si pembeli.<sup>18</sup>

Akad jual beli ini merupakan budaya melayu yang terjadi pada masa dulunya dan telah mendapat perhatian khusus dalam perundangan oleh hakim-hakim di Inggris.<sup>19</sup> Budaya Melayu ini perlu untuk dikembangkan dan dapat ditawarkan kepada institusi keuangan dan perbankan agar dijadikan sebagai salah satu produk perbankan Islam dalam bentuk *pembiayaan modal*. Adapun sebagai sasaran dari produk ini adalah masyarakat petani kecil dalam mengusahakan penanaman padi, kelapa, kelapa sawit, sayur-sayuran dan sebagainya

yang berada dipedesaan, dimana masyarakat pedesaan tersebut sukar untuk mendapatkan modal daripada sumber yang lain. Pemerintah perlu juga memperkirakan masalah ini untuk dijadikan sebagai salah satu bentuk pembiayaan yang dilakukan baik itu pada Dinas Perkebunan, Pertanian, dan sebagainya.

**e. Jual Beli Berdeposit/ Uang Pangkal (*Bay' al-'Arbun*)<sup>20</sup>**

Akad jual beli seperti ini merupakan bebarapa akad muamalah yang telah terjadi dan menjadi kebiasaan masyarakat melayu dan sampai sekarang pun masih berlaku dan mudah-mudahan terus berlaku. Dalam fiqh, akad bentuk ini dikenal dengan *Bay' al-'Arbun*, dalam bahasa Arab berarti pembeli membayar uang pendahuluan. Dari segi istilah kata *Bay' al-'Arbun* dapat diartikan sebagai suatu akad jualbeli yang dilakukan dengan suatu pembayaran pendahuluan pada suatu harga barang, dimana pembayaran uang pangkal atau deposit tersebut merupakan bagian dari jumlah uang yang harus dibayar secara keseluruhannya oleh pembeli sekiranya jual beli itu diteruskan. Sebaliknya jika pembeli membatalkan akad tersebut, maka uang pangkal tersebut menjadi milik penjual dan tidak akan dikembalikan lagi kepada si pembeli meskipun si pembeli meminta kembali uang pangkalnya.<sup>21</sup>

Para fuqaha mendefenisikan jual beli seperti ini adalah pembelian yang dilakukan tanpa membayar semua harganya, namun pembeli hanya membayar sejumlah uang sebagai pendahuluan saja sedangkan sisanya akan dibayar kemudian apabila pembeli ingin meneruskan akad tersebut.<sup>22</sup> Dengan kata lain, sekiranya pembeli bersetuju meneruskan akad tersebut maka uang pangkal ini dianggap sebagai bagian dari jumlah uang terhadap harga barang yang dijual, dan sekiranya pembeli membatalkan akad jual beli tersebut, maka uang tersebut dianggap hangus dan menjadi milik penjual. Pendapat ini dibenarkan oleh para fuqaha berdasarkan hadis-hadis Rasulullah saw dan amalan para Sahabat. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan

oleh Zayd bin Aslam yang bertanya kepada baginda Rasulullah saw tentang *Bay' al-'Arbun* dan baginda meneruskannya.<sup>23</sup> Sebuah hadis Shahih yang terdapat di dalam Shahih Al-Bukhari yang artinya:

*“Diriwayatkan dari Ibn ‘Aun dari Ibn Sirin katanya: Seorang penyewa berkata kepada tuan punya binatang tunggangan yang bakal disewanya: “siapakah binatang tunggangan kamu, sekiranya saya tidak jadi menyewa binatang itu pada hari sekian (tertentu), maka bagimu bayaran ganti rugi 100 dirham”, ternyata kemudiannya penyewa tadi tidak jadi bertolak, maka menurut shurayh: “Barangsiapa yang membuat syarat ke atas dirinya secara sukarela tanpa paksaan, maka syarat tersebut adalah terpakai”.*<sup>24</sup>

Ibn Qayyim telah mengharuskan akad ini berdasarkan hadis tersebut, dimana sebagai alat bukti yang harus dilakukan untuk mengambil bayaran tertentu dalam satu akad yang diakibatkan oleh menunggu atau tergendalanya suatu kegiatan ekonomi.<sup>25</sup> Selain daripada itu akad ini bertujuan untuk memastikan pembeli tersebut apakah benar-benar serius dalam akadnya atau tidak, sebagai bayaran ganti rugi yang ditanggung oleh penjual dalam tempo menunggu jika pembeli tidak meneruskan akadnya adalah uang pangkal tersebut sebagai gantinya.<sup>26</sup>

Kemudian para fuqaha juga berpegang kepada amalan para sahabat Rasulullah saw yang diriwayatkan oleh Nafi' bin al-Harith, beliau telah membelikan Syaidina Umar al-Khatab sebuah rumah dari Safwan bin Umayyah untuk dijadikan penjara dengan harga 4 ribu dirham. Dalam jual beli ini disyaratkan jika sekiranya Syaidina Umar tidak setuju dengan jual beli ini, maka Safwan selaku penjual akan mendapat 400 dirham.<sup>27</sup> Berdasarkan kepada dailil tersebut diatas maka dapat dikatakan bahwa pelaksanaan jual beli berdeposit/Uang pangkal adalah sah dalam pandangan Islam.

Dalam kegiatan ekonomi masa kini, akad seperti ini amat penting dilakukan untuk menjaga kepentingan para pihak yang melakukan akad terutama pihak penjual. Dimana penjual terbuka

peluang kepada bahaya kerugian jika pembeli membatalkan akad tersebut. Adanya deposit/uang pangkal itu menjadi jaminan kepada penjual terhadap akad yang dilakukan. Akad ini tidak hanya berlaku pada jual beli, namun dapat juga diterapkan kepada sewa-menyewa dan lain-lain.

**f. Jual Beli Angsuran (*Al- Bay’Bithaman Ajil*)**

Jual beli angsuran adalah jual beli yang dilakukan secara angsuran atau lebih dikenal dengan istilah jual beli kredit dalam kalangan masyarakat modern. Pelaksanaan jual beli angsuran ini sama halnya dengan jual beli kredit, dimana penjual menjualkan barang dagangannya kepada pembeli dengan pembayaran yang dilakukan secara beransur-ansur/ cicilan. Dalam Islam jual beli yang dilakukan secara kredit/ angsuran dalam jangka yang lama (5 tahun keatas) dikenal dengan istilah *Al- Bay’Bithaman Ajil*. *Al-Bay’Bithaman Ajil* adalah akad pembelian barang dengan pembayaran secara cicilan/ angsuran.<sup>28</sup> Perhatian utama yang perlu dilakukan dalam prilaku muamalah yang dilakukan oleh masyarakat melayu yang telah menjadi budaya tersebut adalah jual beli yang dilakukan tanpa menetapkan jumlah angsuran yang harus dibayar oleh pembeli kepada penjual. Pembayaran dilakukan oleh pembeli sesuai dengan kesanggupannya untuk membayar dalam istilah melayu lebih dikenal dengan sebutan “*berape ada saje*”, tidak menjadi jumlah yang telah ditetapkan setiap pembayaran. Inilah yang menjadi perbedaan yang mendasar bila dibandingkan dengan pelaksanaan jual beli yang dilakukan secara kredit. Jika pembelian yang dilakukan secara kredit jumlah pembayarannya ditetapkan secara berkala setiap kali pembayaran.

Ini merupakan pelajaran yang menarik bagi kita semua, karena unsur tolong-menolong, bantu-membantu dalam bentuk kekeluargaan sangat jelas dilakukan oleh masyarakat melayu yang telah menjadi budaya dari dulu sampai sekarang dituangkan dalam bentuk perdagangan. Bagi masyarakat yang miskin, terhadap pemberian

pinjaman yang dilakukan oleh institusi keuangan dan pemerintah sangat mungkin untuk dikembangkan kepada mereka yang membutuhkan tersebut dengan menjalankan konsep-konsep budaya yang digali dari konsep-konsep syariah sebagai acuan mendasar yang telah berlaku. Para pengusaha yang melakukan praktek-praktek budaya melayu tersebut tidak pernah mengalami kerugian malah untung yang mereka peroleh dari angsuran yang diterima tanpa menetapkan jumlah pembayaran dan mereka lebih merasakan keikhlasan dan keredhaan dari masing-masing pihak yang melakukan transaksi tersebut.

### **C. SISTEM PERBANKAN ISLAM**

Pembahasan tentang bank lebih lanjut tidak terlepas dari mengetahui apa itu sebenarnya bank. Untuk itu dalam tulisan ini akan dijelaskan terlebih dahulu berhubungan dengan pengertian bank itu sendiri, sejarah bank Islam dan bagaimana sistem pelaksanaannya. Bank<sup>29</sup> Islam atau perbankan Islam (*Islamic Banking*) adalah lembaga yang didirikan untuk menyediakan kemudahan dan pelayanan bank khususnya kepada Umat Islam dengan cara yang berdasarkan kepada hukum syariah.<sup>30</sup> Sedangkan sistem perbankan Islam adalah satu kerangka kerja institusi perbankan dan keuangan yang menjalankan prinsip berdasarkan kepada syariah untuk merealisasikan keadilan dalam menyalurkan kekayaan dan pendapatan.<sup>31</sup> Dari dulu lagi umat Islam di dunia pada umumnya dan Indonesia pada khususnya berkeinginan untuk melihat berdirinya sistem perbankan yang berdasarkan kepada konsep-konsep Islam yang lebih kenal dengan perbankan Islam. Untuk menjadikan impian ini sebagai suatu kenyataan bermacam-macam usaha telah dilakukan oleh para cendekiawan muslim, para ulama, ahli-ahli ekonomi Islam dan para pegawai bank di dunia Islam untuk membentuk terwujudnya bank perdagangan Islam yang beroperasi berdasarkan kepada prinsip-prinsip muamalah Islam.<sup>32</sup>

Hasil dari usaha yang begitu gigih pada akhirnya membuahkan hasil dengan terbentuklah bank perdagangan Islam yang pertama di Dubai pada tahun 1975. Bank Pembangunan Islam (*Islamic Development Bank*) juga didirikan pada tahun yang sama berpusat di Jeddah. Sebelum tahun 1974, telah terwujud sebuah bank yang pertama di zaman moden yaitu pada 25 Juni 1963 yang terletak di Mit Ghamr, kira-kira 40 Km di utara kota Kaherah yang dipimpin oleh Ahmad al-Hajjar.<sup>33</sup> Bank ini merupakan perbankan yang berskala kecil yang terletak disepanjang delta sungai Nil, namun institusi ini mampu menjadi pemicu yang sangat berarti bagi perkembangan perbankan dan ekonomi Islam. Di Indonesia perbankan seperti ini hampir sama dengan KUD (Koperasi Unit Desa).

Menurut catatan akhir tahun 1983 terdapat 50 buah bank yang beroperasi di seluruh dunia yang menjalankan menurut konsep syariah, termasuk di negara-negara bukan Islam, sehingga golongan yang bukan Islam juga telah mulai berurusan dengan bank-bank Islam. Berkembangnya bank-bank syariah di negara-negara Islam sangat berpengaruh bagi Indonesia, terutama dengan berdirinya perbankan Islam di negara jiran Malaysia dengan terbentuknya lembaga dan urusan tabung haji (LUTH)<sup>34</sup> pada tahun 1969 yang mana umat Islam di Malaysia tidak begitu banyak bila dibandingkan dengan Indonesia, hal ini juga dapat memicu terbentuknya bank Islam di Indonesia.

Perkembangan lebih lanjut di Indonesia dengan diadakan kajian yang khusus yang dilakukan para tokoh yang terlibat adalah Karnaen A. Perwataatmadja, M. Dawam Raharjo, A.M. Saefuddin, M. Amim Aziz dan lain-lain. Kemudian dilakukan beberapa uji coba pada skala yang relatif kecil telah diwujudkan, diantaranya adalah Baitul Tamwil Salman Bandung, Koperasi Ridho Gusti di Jakarta.<sup>35</sup>

Perjuangan yang lebih khusus untuk mendirikan bank Islam di Indonesia baru dilakukan pada tahun 1990, dimana dengan diadakannya lokakarya *Bunga Bank dan Perbankan* di Cisarua, Bogor dan Jawa Barat yang dilakukan oleh Mejlis Ulama Indonesia pada tanggal 18-20 Agustus 1990 dengan menghasilkan pembahasan yang

mendalam pada Musyawarah Nasional IV MUI, maka terbentuklah kelompok kerja untuk mendirikan bank Islam di Indonesia.<sup>36</sup>

Bulan September 1999, bank Muamalah Indonesia telah memiliki lebih dari 45 outlet yang terbesar di Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Balikpapan dan Makasar.<sup>37</sup> Tahap ini bank Islam belum mendapat perhatian yang maksimal dari masyarakat di bandingkan dengan perbankan konvensional. Dalam perbankan Islam landasan hukum pelaksanaannya berdasarkan kepada prinsip-prinsip syariah yang lebih dikenal dengan “*sistem bagi hasil*”, ini ditegaskan lagi yang merupakan pencerminan dari UU No 7 Tahun 1992.

Di era Reformasi, perkembangan perbankan syariah ditandai dengan disetujuinya UU No 10 Tahun 1998. Berdasarkan Undang-undang tersebut landasan hukum disebutkan secara rinci serta jenis-jenis usaha yang dilakukan oleh bank syariah serta memberikan arahan kepada bank-bank konvensional untuk membuka cabang syariah bahkan mengkonversi diri secara seutuhnya menjadi bank syariah.

Kesempatan ini tentunya disambut oleh seluruh lapisan masyarakat perbankan dengan memberikan pelatihan bagi para stapnya dalam bidang perbankan syariah. Bank Indonesia melakukan antisipasi dini terhadap ultimatum dari UU No 10 Tahun 1998 yang dikeluarkan tersebut dengan melakukan “*Pelatihan Perbankan Syariah*” bagi para pejabat dari segenap bagian, terutama aparat yang berkaitan langsung seperti Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan, kredit, pengawasan, akuntansi, riset dan moneter.<sup>38</sup>

Perkembangan lebih lanjut berdirinya Bank Syariah Mandiri (BSM), merupakan terbentuknya bank Islam pertama milik pemerintah yang bentuk operasinya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Secara struktural bank ini terbentuk dari Bank Susila Bakti (BSB), sebagai salah satu anak perusahaan pada lingkungan Bank Mandiri. Kemudian dikonversikan menjadi bank syariah sepenuhnya yang melakukan kerjasama dengan Tazkia Institute, terutama dalam bidang pelatihan dan pendamping pendirian. Bank Syariah Mandiri ini memiliki beberapa keunggulan komparatif dibandingkan dengan

pendahulunya yaitu Bank Muamalah Indonesia. Ini terbukti dengan keberhasilannya dilihat dari aset BSM pada akhir tahun 1999 sejumlah Rp 400.000.000.000.00 (empat ratus miliar rupiah) menjadi di atas 2 hingga 3 triliun. Perkembangan ini juga diikuti dengan peningkatan jumlah cabang BSM yang ada diseluruh Indonesia, yaitu dari 8 menjadi lebih dari 20 buah yang telah berdiri.

Pasca reformasi perkembangan perbankan syariah di Indonesia mengalami peningkatan, ini menunjukkan bahwa penantian dan harapan serta sambutan terhadap perkembangan perekonomian yang berdasarkan kepada prinsip-prinsip syariah sudah begitu didambakan oleh seluruh bangsa Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari beberapa bank yang sudah dan akan membuka cabang syariah diantaranya:

- a. Bank IFI (membuka cabang syariah pada 28 juni 1999)
- b. Bank Niaga (akan membuka cabang syariah)
- c. Bank BNI (dikenal dengan BNI Syariah)
- d. Bank BTN (akan membuka cabang syariah)
- e. Bank Mega
- f. Bank Bukopin
- g. BPD Jabar (membuka cabang di Bandung)
- h. BPD Aceh
- i. BPD Riau (dikenal dengan Bank Riau Syariah)
- j. Bank BRI (dikenal dengan Bank Rakyat syariah)

Pelaksanaan prinsip-prinsip syariah sangat dimungkinkan untuk dilaksanakan didalam perbankan Islam yang ada di Indonesia khususnya. Dalam melaksanakan operasinya, intrumen-instrumen perdagangan dan pembiayaan yang mapan dan berdaya maju serta mampu untuk bersaing dengan intrumen-instrumen perbankan konvensional. Instrumen-instrumen tersebut harus berdasarkan kepada akad simpanan, akad memberi jasa dan kepercayaan, akad perkongsian dan akad jualbeli (keuntungan). Pelaksanaan akad-akad muamalah di dalam perbankan yang berdasarkan kepada prinsip syariah dapat dilakukan dalam beberapa bentuk pelaksanaannya, diantaranya:

1. Prinsip Jasa

- Dalam bentuk akad jasa dan Kepercayaan
  - Al-Wadi'ah (Titipan)
  - Al-Ijarah (Sewa)
  - Al-Jualah (Komisi)
  - Al-Hiwalah (Peralihan Utang)
  - Al-Wakalah (Perwakilan)
  - Al-Sarf (Pertukaran Mata Uang)
  - Al-Kafalah (Jaminan)
  - Al-Rahn (Pergadaian)
- 2. Prinsip Bagi Hasil
  - Dalam bentuk akad kerjasama/Investasi
    - Al-Musyarakah
    - Al-Mudharabah
    - Al-Muzara'ah
    - Al-Musaqah
    - Al-Qard Hasan
- 3. Prinsip Keuntungan
  - Dalam bentuk akad jual beli
    - Al-Murabahah
    - Al-Bay' Bitsaman Ajil
    - Bay al-Salam
    - Bay al-Istishna'
    - Bay al-Dayn
    - Bay al-'Inah
    - Bay al-'Arbun
    - Bay al-Wafa'
- 4. Prinsip Simpanan
  - Dalam bentuk akad titipan
    - Al-Wadi'ah
  - Dalam bentuk akad investasi
    - Al-Mudharabah

#### **D. KESIMPULAN**

Dari penjelasan di atas, budaya (*'urf*) yang dilakukan oleh masyarakat dapat dijadikan sebagai produk perbankan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dalam urusan perbankan. Prilaku muamalah ini tidaklah bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah yang berlaku. Ini terbukti bahwa pelaksanaan seperti ini pernah dilakukan oleh masyarakat Arab di awal kedatangan Islam. Kedatangan Islam ke dunia tidak menghapus keseluruhan prilaku muamalah yang terjadi pada saat itu, malah prilaku seperti itu dikembangkan menjadi suatu prinsip dalam perekonomian Islam, seperti *wadi'ah*, *gadaian*, *sewaan*, *Al-Bay' Bithaman Ajil*, *Bay' al-'Arbun*, *Bay' al-Wafa'* dan sebagainya.

Sebenarnya masih banyak lagi prilaku muamalah budaya melayu yang dapat dijadikan sebagai dasar produk perbankan. Ini hanya merupakan sekelumit saja untuk memancing pertumbuhan pemikiran yang perlu dikembangkan ditengah-tengah masyarakat sebagai panduan didalam bermuamalah. Pelaksanaan prilaku muamalah yang ada di dalam masyarakat melayu yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah tersebut perlu dikembangkan dengan tidak merasa keraguan untuk melakukannya. Selanjutnya diharapkan kepada pemikir-pemikir Islam dalam penyelesaian prilaku muamalah budaya yang terjadi di tengah-tengah masyarakat tersebut dapat diselesaikan tanpa terikat dari perbedaan para mazhab Islam, yang perlu diperhitungkan adalah keperluan dengan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

Di samping itu, penjelasan ini dibuat untuk menyadarkan kepada perbankan dan institusi keuangan lainnya baik itu pemerintah maupun swasta supaya menerapkan prinsip-prinsip yang telah ada itu dihidupkan dan dikembangkan menjadi formula baru sehingga dari tradisi yang khas dulunya menjadi fenomena baru dalam menghadapi tantangan global dalam perekonomian tersebut. Untuk itu penerapan sistem syariah yang merupakan jawaban atas ketimpangan yang berlaku selama ini sangat perlu dilakukan. Para ulama, ahli ekonomi Islam dan para pengamat perbankan Islam, prilaku muamalah budaya

ini bisa dijadikan sebagai produk perbankan untuk membiayai proyek-proyek dan sebagainya dalam membutuhkan pembiayaan modal kecil dan besar; jangka pendek, menengah dan panjang, secara tidak langsung dapat membantu bagi para petani dan masyarakat yang berpotensi untuk mengembangkan usaha mereka menjadi pengusaha yang sukses dan berjaya.

**Endnotes:**

1. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (1990), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, h. 130; *Enciklopedi Indonesia*, Edisi Khusus. Jakarta: Ichtiar Baru, h. 531
2. Arisan adalah pengumpulan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian di undi diantara mereka untuk menentukan siapa yang memperoleh undian pertama, dilaksanakan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya. Lihat, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (1990), *Ibid.*, h. 48
3. Joni Tamkin Borhan, "Pengaruh Budaya Dalam Menentukan Hukum Muamalat", Seminar Hukum Islam Semasa III Peringkat Kebangsaan. Jabatan Fiqh dan Usul, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, 7 & 8 November 2000
4. Joni Tamkin Borhan, *Ibid.*
5. Qard al-*hasan* atau dalam istilah perbankan disebut juga dengan *benevolent loan* merupakan pinjaman lunak yang diberikan atas dasar kewajiban sosial/tolong-menolong semata di mana si peminjam tidak dituntut apapun selain dari pengembalian modal pinjaman. Lihat juga, Mohammad Hashim Kamali (1999), *Freedom, Equality, and Justice in Islam*, Selangor: Ilmiah Publisher, h. 191.
6. Kedua istilah ini disamakan oleh masyarakat yang melakukan pergadaian/pajak kebun, meskipun istilah ini pada dasarnya berbeda pengertiannya secara mendalam, namun penulis menggunakan kedua istilah ini dalam satu makna. Ini disebabkan oleh kedua istilah ini disamakan oleh masyarakat yang melakukan kegiatan muamalah tersebut.
7. Joni Tamkin Borhan, "Falsafah Ekonomi dan Instrumen Muamalah dalam Amalan Perbankan Islam di Malaysia", *Jurnal Syariah*. Universiti Malaya: Jabatan Syariah dan Ekonomi, h. 137
8. Ibn Abidin (tt), *Hasyiyah Ibn Abidin*, Vol. V. Beirut: Dar al-Fikr, h. 339; al-Sarakhsi (1982), *Al-Mabsuti*, Vol. XXI. Beirut: Dar al-Fikr, h. 63
9. Keterangan dari judul ini berdasarkan kepada observasi dan temubual yang penulis lakukan secara informal saja, makanya istilah tersebut kental dengan bahasa melayunya.
10. *Kamu Bahasa Indonesia*.
11. *Kamus Dewan*, Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur, 1989, h. 922
12. Misalnya kerbau, kambing, dan lembu diberikan oleh jabatan hewan kepada peternak dan kemudian peternak akan mengembalikan hewan yang sama jantina dan umurnya kepada jabatan hewan tersebut. Skim ini berlaku setelah hewan betina yang dipawah itu melahirkan anak, dan anak inilah yang akan

- dipulangkan kepada jabatan hewan sebagai ganti daripada baka yang asal. Lihat, Joni Tamkin Borhan, *Op.cit.*, h. 7
13. Kamus Bahasa Inggris. Dalam bahasa Belanda Istilah ini lebih dikenal dengan "Lenen".
  14. Justin K. Camoens (1971), *The Pawah Sistem in East Pahang*. Ministry of Agriculture and Lands, h. 2
  15. Al-Zarqa (1968), *Sharh al-Qanun al-Suri: al'Uqud al-Musammah*. Damsyiq: Dar al-Kitab, h. 23; *al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah*, J. 9. Kuwait, 1987, h. 48-49
  16. W. E. Maxell, "The Law and The Customs of the Malays with Reference to the Tenure of Land", *Journal of the Straits Branch of The Royal Asiatic Society*, No. XIII, June 1884, h. 123; Cf. M. B. Hooker (1970), *Reading in Malay Adats Laws*. Singapore: tp, h. 354-361; J. M. Gullick (1987), *Malay Society in the Late Nineteenth Century*. Singapore: tp, h. 98-149.
  17. 'Abd al-Rahman al-Sabuni (1980), *al-Madkhal li Dirasah al-Tasyri' al-Islami*, J. I. Damsyiq: Matba'ah al-Riyad, h. 64.
  18. Saleh Buang (1988), "Ke Arah Pengislaman Kanun Tanah Negara" dalam *Fakulti Undang-undang Universiti Malaya, Makalah Undang-undang Menghormati Ahmad Ibrahim*. Kuala Lumpur: DBP, h. 175-176
  19. Antara lain dalam perkara *Tengku Zahara Lawan Che Yusuf* (1951 MLJ D), Hakim Briggs memutuskan bahwa tujuan transaksi jual janji ialah untuk mendapatkan kemudahan kredit (hutang) dan memberikan kepada pemberi pinjaman (pembeli tanah) bayaran gantirugi yang setimpal, tanpa terlibat dengan amalan bunga (usury) dimana orang-orang Islam dilarang terlibat untuk melakukannya, Lihat. Norhashimah Mohd. Yasin (1996), *Islamization/ Malaynization: A Study of the Role of Islamic Law in the Economic Development of Malaysia: 1969-1993*. Kuala Lumpur: tp, h. 264
  20. Ahmad Al-Sharbasi (1981), *Al-Mu'jam al-Iqtisadi al-Islami*. Istanbul: Dar al-Jayl, h. 59
  21. Ibn Rusyd, *Bidayatul al-Mutahid wa Nihayah al-Muqtasid*, J. 2. Beirut: Dar al-Fikr, h. 122; Ibn Qudamah (1984), *Al-Mughni*. Beirut: tp, h. 313; Md. Nuridin Hj. Ngadimon, "Jual Beli Berdeposit: Satu Penilaian Fiqh", *Jurnal Syariah*, J. 2, Juli 1994, h. 72
  22. Ibn Rusyd, *Op.cit.*, h. 122
  23. Ibn Hajar al-'Asqalani (1964), *Talkhis al-Hibr*, J. 3. Madinah, h. 17; Wahbah al-Zuhaili (1989), *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, J. 4. Beirut: Dar al-Fikr, h. 449-450
  24. Al-Bukhari (1991), *Shahih al-Bukhari*, J. 3. Beirut: Dar al-Fikr, h. 234
  25. Ibn Qayyim (t.t), *A'lam al-Muwaqqin 'an Rabb al-'Alamin*, J. 3. Beirut: Dar al-Fikr, h. 400
  26. Al-Zarqa (1968), *Al-Madkhal al-Fiqh al-'Am*, J. 1. Damsyiq: Dar al-Fikr, h. 459

27. Ibn Qudamah (1984), *Op.cit.*, h. 313
28. Osman Sabran (2000), *Loc.cit.*, h. 4; Karnaen Perwataatmadja dan Muhammad Syafi'i Antonio (1992), *Apa dan Bagaimana Bank Islam*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, h. 26
29. Perkataan bank berasal daripada perkataan Itali yaitu "Banco" yang berarti kepingan papan tempat meletak buku atau sejenis meja yaitu "bench". Kemudian penggunaannya telah diperluaskan kepada meja (counter) tempat menukar uang yang digunakan oleh pemberi pinjaman dan penukar uang di Eropa pada abad pertengahan untuk mempamirkan uang mereka. Dari sinilah bermulanya perkataan bank. (Lihat, *The New Encyclopedla Britannica*, Vol. I, Chicago, 1985, h. 872). Penukaran uang pada zaman purba, Bank mempunyai peranan yang sangat penting sebagai pengawasan (banco atau bench). Pengusaha bank pada abad pertengahan akan dimusnahkan oleh orang ramai jika dia gagal dalam urusannya dan dari sinilah munculnya perkataan bankrupt. (*Thomson's Dictionary of Banking*, h. 53).
30. Rosli Mahmood (1994), *Konsep Dasar Perbankan*. Kuala Lumpur: DBP, h. 15; *Kamus Perbankan*. Kuala Lumpur: DBP, 1998, h. 12
31. Sudin Haron (1996), *Prinsip dan Operasi Perbankan Islam*. Kuala Lumpur: Berita Publishing, h. 2; Abdul Halim Ismail, "Bank Islam Sebagai Satu Institusi Pembangunan Masyarakat Islam" dalam Muhammad Syukri Salleh (ed) (1990), *Konsep dan Pelaksanaan Pembangunan Berteraskan Islam*. KL: Universiti Sains Malaysia, h. 69
32. Traute Wohler-Scharf (1983), *Arab and Islamic Banking*, Paris: Development Center of the organization for Economic Cooperation And Development; Azlan Khalili Shamsuddin (1988), *Banking and Public Finance in Islam*. Dewan Pustaka Fajar, h. 23-25
33. Objek utama berdirinya bank ini adalah untuk mendirikan sebuah bank unit yang dapat mendidik penduduk untuk menggunakan sumber-sumber yang mereka miliki dengan seoptimal mungkin tanpa tergantung kepada bank konvensional yang berdasarkan kepada riba. Walaupun telah mendapat sambutan dan dukungan yang luar biasa dari masyarakat oleh para petani, pada tahun 1967, bank ini telah diperintahkan untuk ditutup oleh pemerintah kerajaan Mesir pada waktu itu atas sebab-sebab politik. Pada waktu penutupannya, ia telah mempunyai uang simpanan para pen deposit sejumlah 1.828.375.00 pound Mesir daripada dana awalnya sebesar 40.944.00 pound pada tahun 1963/64. jumlah penyimpanan di bank ini juga telah bertambah secara mendadak yaitu dari 17.560 penyimpanan menjadi 251.152 penyimpanan. Lihat, R. K. Ready (1967), "The Egyptian Municipal Savings Bank Project", *International Development Review*. Vol. IX (2), h. 2; Sudin Haron, *Op.cit.*, h. 8
34. Ada sebagian pengkaji menganggap LUTH sebagai Institusi keuangan Islam yang pertama di dunia dan contoh terbaik sebagai salah satu institusi keuangan

- yang khusus seperti itu dapat beroperasi dengan sukses mengikut prinsip-prinsip Islam. Lihat Ausaf Ahamad (1995), "The Evolution of Islamic Banking" dalam *Encycloepadia of Islamic Banking And Insurance*. London: tp, h. 23; Ab. Mumin Ab. Ghani (1999), *Sistem Keuangan Islam dan Pelaksanaannya di Malaysia*. Kuala Lumpur: Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, h. 326-327; Ungku Abdul Aziz (1959), *Pilgrims Economy Improvement Plan*. Kuala Lumpur, kemudian dalam, *Lembaga Urusan dan Tabungan Haji Sebagai Satu Institusi Pelaburan Islam*. Kuala Lumpur: tp. 1980, h. 7-8
35. Muhammad Syafi'i Antonio (2001), *Islamic Banking*. Terj. (Bank Syariah dari Teori ke Praktek). Jakarta: Gema Insani, h. 25
  36. Bank Muamalah Indonesia didirikan pada tanggal 1 November 1991. Pada saat penandatanganan akte pendirian ini terkumpul komitmen pembelian saham sebanyak Rp 84 Miliar, kemudian pada saat presiden datang ke Istana Bogor pada tanggal 3 November 1991 dapat dipenuhi dengan total modal disetor awal sebesar Rp 106.126.382.000.00. Dengan modal tersebut maka pada tanggal 1 Mei 1992 bank muamalah mulai beroperasi. Lihat, Muhammad Syafi'i Antonio (2001), *Ibid*.
  37. Bank Muamalah, *Annual Report*. Jakarta: 1999; Muhammad Syafi'i Antonio (2001), *Op.cit.* h. 26
  38. Bank Indonesia (1999), *Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Kantor Bank Syariah*. Jakarta: Bank Indonesia; Muhammad Syafi'i Antonio (2001), *Loc.cit.*, 26

### DAFTAR PUSTAKA

- ‘Abd al-Rahman al-Sabuni (1980), *al-Madkhal li Dirasah al-Tasyri’ al-Islami*, J. I. Damsyiq: Matba’ah al-Riyad
- Ungku Abdul Aziz (1959), *Pilgrims Economy Improvement Plan*. Kuala Lumpur, kemudian dalam, *Lembaga Urusan dan Tabungan Haji Sebagai Satu Institusi Pelaburan Islam*. Kuala Lumpur: tp. 1980
- Ahmad Al-Sharbasi (1981), *Al-Mu’jam al-Iqtisadi al-Islami*. Istanbul: Dar al-Jayl
- Ibn Abidin (tt), *Hasyiyah Ibn Abidin*, Vol. V. Beirut: Dar al-Fikr
- Ausaf Ahamad (1995), “The Evolution of Islamic Banking” dalam *Encycloepadia of Islamic Banking And Insurance*. London: tp
- Azlan Khalili Shamsuddin (1988), *Banking and Public Finance in Islam*. Dewan Pustaka Fajar
- Ahmad, Khurshid (1980), *Studies in Islamic Economics*. Leicester, UK: The Islamic Foundation.
- Arif, Muhammad (1982), *Monetary and Fiscal Economics of Islam*. Jeddah: International Centre for Research in Islamic Economics.
- Al-Batriq (1977), “Planning for Economic Development in an Islamic Framework”, dalam Ilyas ba-Yunus (ed), *Islam and Development*. Plainfield, Indiana: The Association of Muslim Social Scientists.

Baran, Paul (1957), *The Political Economy of Growth*. England: Penguin Edition.

\_\_\_\_\_ (1975), *The Political Economy of neo-Colonialism*. London: Heinemann.

Boeke, J.H (1953), "Economics and Economic Policy of Dual Societies", *Three Form of Disintegration in Dual Societies*, April 1954.

Bonne, Alfred (1960), *Studies in Economic Development*. London: Routledge and Kegan Paul.

Bulanadi, A (1970), "An Ecological Study of A Development Organization: The Philippine Community Development Program from Its Inception to The Present (1956-1968)". (Dissertation, Claremont).

Burton, Henry J (1965), *Principles of Development Economics*. Englewood Cliffs: Prentice Hall Inc.

Al-Bukhari (1991), *Shahih al-Bukhari*, J. 3. Beirut: Dar al-Fikr

Bank Muamalah, *Annual Report*. Jakarta: 1999

Bank Indonesia (1999), *Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Kantor Bank Syariah*. Jakarta: Bank Indonesia;

Cairncross, A.K. (1962), *Factors in Economic Development*. London: George Allen & Unwin Ltd.

Carter, Aidan Foster (1989), *The Sociology of Development*. Rahimah Abdul Azis (Terj.). Malaysia: Dewan Bahasa dan Kementerian Pendidikan.

Chapra, M. Umer (1993), *Islam and Economic Development*.  
Islamabad Pakistan: International Institute of Islamic Thought  
and Islamic Research Institute.

\_\_\_\_\_ (1995), *Islam and The Economic Challenge*.  
Herndon: The Islamic Foundation and The International Institute  
of Islamic Thought.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (1990), *Kamus Besar  
Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka

\_\_\_\_\_ (1989), *Kamus Dewan*, Dewan Bahasa dan  
Pustaka, Kuala Lumpur

*Enciklopedi Indonesia*, Edisi Khusus. Jakarta: Ichtiar Baru

*Economic Development of Malaysia: 1969-1993*. Kuala Lumpur: tp

*The New Encyclopedla Britannica*, Vol. I, Chicago, 1985, h. 872).

Ibn Hajar al-‘Asqalani (1964), *Talkhis al-Hibr*, J. 3. Madinah

Cf. M. B. Hooker (1970), *Reading in Malay Adats Laws*. Singapore:  
tp

Joni Tamkin Borhan, “Pengaruh Budaya Dalam Menentukan Hukum  
Muamalat”, *Seminar Hukum Islam Semasa III  
Peringkat Kebangsaan*. Jabatan Fiqh dan Usul, Akademi  
Pengajian Islam, Universiti Malaya, 7 & 8 November  
2000

\_\_\_\_\_, “Falsafah Ekonomi dan Instrumen Muamalah  
dalam Amalan Perbankan Islam di Malaysia”, *Jurnal*

*Syariah*. Universiti Malaya: Jabatan Syariah dan  
Ekonomi, h. 137

Justin K. Camoens (1971), *The Pawah Sistem in East Pahang*.  
Ministry of Agriculture and Lands

J. M. Gullick (1987), *Malay Society in the Late Nineteenth Century*.  
Singapore: tp

Karnaen Perwataatmadja dan Muhammad Syafi'i Antonio (1992),  
*Apa dan Bagaimana Bank Islam*. Yogyakarta: Dana  
Bhakti Wakaf

Md. Nurdin Hj. Ngadimon, "Jual Beli Berdeposit: Satu Penilaian  
Fiqh", *Jurnal Syariah*, J. 2, Juli 1994

Muhammad Syukri Salleh (ed) (1990), *Konsep dan Pelaksanaan  
Pembangunan Berteraskan Islam*. KL: Universiti Sains  
Malaysia

Muhammad Syafi'i Antonio (2001), *Islamic Banking*. Terj. (Bank  
Syariah dari Teori ke Praktek). Jakarta: Gema Insani

Ab. Mumin Ab. Ghani (1999), *Sistem Keuangan Islam dan  
Pelaksanaannya di Malaysia*. Kuala Lumpur: Jabatan  
Kemajuan Islam Malaysia

Mohammad Hashim Kamali (1999), *Freedom, Equality, and Justice  
in Islam*, Selangor: Ilmiah Publisher

W. E. Maxell, "The Law and The Customs of the Malays with  
Reference to the Tenure of Land", *Journal of the Straits  
Branch of The Royal Asiatic Society*, No. XIII, June  
1884

Norhashimah Mohd. Yasin (1996), *Islamization/Malaynization: A Study of the Role of Islamic Law in the*

Ibn Qayyim (t.t), *A'lam al-Muwaqqin 'an Rabb al-'Alamin*, J. 3.  
Beirut: Dar al-Fikr

Ibn Qudamah (1984), *Al-Mughni*. Beirut: tp

Quresyi, Anwar Iqbal (1961), *Islam and Theory of Interest*. Lahore:  
SH. Muhammad Ashraf.

Al-Rahman, Afzal (1985), *Economic Doctrines of Islam*. Lahore:  
Islamic Publication Ltd.

Ibn Rusyd, *Bidayatul al-Mutahid wa Nihayah al-Muqtasid*, J. 2.  
Beirut: Dar al-Fikr

Rosli Mahmood (1994), *Konsep Dasar Perbankan*. Kuala Lumpur:  
DBP, h. 15; *Kamus Perbankan*. Kuala Lumpur:  
DBP,1998

R. K. Ready (1967), "The Egyptian Municipal Savings Bank Project",  
*International Development Review*. Vol. IX (2)

Sudin Haron (1996), *Prinsip dan Operasi Perbankan Islam*. Kuala  
Lumpur: Berita Publishing

al-Sarakhsi (1982), *Al-Mabsuti*, Vol. XXI. Beirut: Dar al-Fikr

Saleh Buang (1988), "Ke Arah Pengislaman Kanun Tanah Negara"  
dalam Fakulti Undang-undang Universiti Malaya,  
*Makalah Undang-undang Menghormati Ahmad  
Ibrahim*. Kuala Lumpur: DBP

Traute Wohler-Scharf (1983), *Arab and Islamic Banking*, Paris:  
Development Center of the organization for Economic  
Cooperation And Development

Wahbah al-Zuhaili (1989), *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, J. 4.  
Beirut: Dar al-Fikr

Al-Zarqa (1968), *Sharh al-Qanun al-Suri: al'Uqud al-Musammah*.  
Damsyiq: Dar al-Kitab, h. 23; *al-Mausu'ah al-  
Fihiyyah*, J, 9. Kuwait, 1987

al-Zarqa (1968), *Al-Madkhal al-Fiqh al-'Am*, J. 1. Damsyiq: Dar al-  
Fikr